



Judul : Banyak fraksi berubah sikap: Fahri Hamzah dilaporkan ke MKD
Tanggal : Kamis, 04 Mei 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Banyak Fraksi Berubah Sikap

Fahri Hamzah Dilaporkan ke MKD

JAKARTA, KOMPAS — Enam hari setelah usulan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi disetujui DPR, semakin banyak fraksi yang berubah sikap. Dari 10 fraksi di DPR, kini tidak ada yang dengan tegas menyatakan mendukung dan akan mengirim anggotanya di panitia angket.

Hingga Rabu (3/5), ada enam fraksi yang menyatakan tak akan mengirim anggotanya ke panitia angket yang akan dibentuk setelah DPR memasuki masa sidang V tahun sidang 2016-2017 pada 18 Mei. Empat fraksi lain menyatakan masih ragu-ragu dan belum menentukan sikap untuk mendukung atau menolak pembentukan panitia angket KPK.

Fraksi Partai Hanura yang sebelumnya tegas menyatakan mendukung usulan hak angket KPK yang disetujui di Rapat Paripurna DPR pada Jumat pekan lalu kini mulai berubah. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, mengatakan, fraksinya di DPR bertindak tanpa izin pimpinan partai. "Saya tidak tahu angket itu disetujui sejauh siapa. Tidak ada komunikasi langsung ataupun tidak langsung dengan saya," kata Oesman.

Dalam draf usulan hak angket KPK yang ditandatangani 26 anggota DPR dari sembilan fraksi, tujuh anggota Fraksi Hanura ikut tanda tangan menjadi pengusul. Hanura adalah fraksi kedua yang anggotanya paling banyak mendukung hak angket. Fraksi pertama adalah Partai Golkar yang didukung 10 anggota fraksi sebagai pengusul.

Hanura juga merupakan fraksi asal Miryam S Haryani, tersangka kasus keterangan tidak benar terkait korupsi KTP elektronik. Pengguliran hak angket KPK pada awalnya hanya bertujuan membuka rekaman pemeriksaan Miryam di KPK yang diduga menyebut nama sejumlah politisi Komisi III sebagai pihak yang

menekannya.

Oesman kini tengah memanggil pimpinan dan anggota fraksinya untuk meluruskan sikap resmi partai terkait pembentukan panitia angket. "Seharusnya segerak ke proses hukum. Kalau nanti ada kegagalan, baru bikin angket," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana, yang juga menjadi salah satu pengusul, mengatakan, karena fraksi adalah perpanjangan tangan partai di DPR, fraksi akan tegak lurus dengan sikap partai.

Fraksi Partai Demokrat kini termasuk yang masih mempertimbangkan untuk mengirimkan anggotanya ke pansus angket. Padahal, meski menyatakan menolak hak angket, Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman menyatakan, fraksinya tetap akan mengirim anggotanya untuk duduk di pansus angket KPK. "Kami mau melawan bagaimana? Kami partai kecil. Kami minoritas mengikuti mayoritas saja," katanya (*Kompas*, 29/4).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, selaku salah satu pengusul, meminta semua fraksi tetap mengirimkan perwakilannya. Guna meyakinkan fraksi-fraksi untuk kembali mendukung hak angket KPK, ia mengatakan, lobi masih berlangsung. "Masih ada 15-20 hari. Lobi-lobinya masih berlangsung, ditunggu saja," katanya.

Melanggar etika

Kemarin, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelang-



garan etika dalam persetujuan hak angket KPK di Sidang Paripurna DPR, pekan lalu. Sebelum ini, sejumlah lembaga swadaya masyarakat juga melaporkan Fahri ke KPK atas dugaan menghalangi peradilan.

MAKI juga melaporkan pimpinan DPR lainnya, Setya Novanto, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan, karena membiarkan Fahri mengambil keputusan secara sepihak terkait persetujuan usulan angket terhadap KPK. "Seharusnya pimpinan DPR lainnya mencegah, mengingatkan, atau mengambil palu sidang dari Fahri," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Terkait pelaporan dirinya, Fahri membiarkan MKD memproses sesuai aturan yang berlaku. "Semua orang boleh menggunakan haknya untuk melapor, tetapi penggunaan hak itu menunjukkan siapa sebenarnya kita," katanya. (AGE/MDN)

SIKAP FRAKSI TERKAIT PEMBENTUKAN PANITIA ANGKET KPK

I: Tidak akan mengirim perwakilan anggotanya ke panitia angket:

1. Partai Amanat Nasional: Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan "Kami akan lawan pembentukan panitia angket dengan cara apa pun. Kalau tidak mengirim (anggota) bisa menyelesaikan masalah, kami tidak kirim".

2. Partai Kebangkitan Bangsa: Ketua Umum PKB Muhammin Iskandar "Kami tidak akan mengirimkan anggota kami".

3. Partai Gerindra: Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid "Gerindra tidak akan mengirim wakil".

4. Partai Persatuan Pembangunan: Sekretaris Fraksi PPP Amir Uskara "Kami akan sampaikan surat keberatan ke pimpinan atas persetujuan hak angket dalam paripurna".

5. Partai Keadilan Sejahtera: Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini "PKS konsisten dengan sejumlah implikasi menolak hak angket, antara lain

Disarikan dari hasil wawancara dan berbagai pemberitaan/Diolah oleh AGE

tidak mengirimkan anggota untuk bergabung dengan pansus angket".

6. Golkar: Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita "Kami tidak akan merekomendasikan nama untuk dikirim ke pansus".

II: Belum mengambil sikap untuk mengirim perwakilan anggotanya ke panitia angket:

1. Nasdem: Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate "Kami masih mempertimbangkan mengirim atau tidak mengirim anggota ke pansus".

2. PDI-P: Bendahara Fraksi PDI-P Alex Indra Lukman "Kami tunggu sampai pembukaan masa sidang berikutnya".

3. Demokrat: Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman "Nanti kami lihat seperti apa angketnya".

4. Partai Hanura: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang "Serahkan ke proses hukum. Kalau ada kegagalan, baru bikin hak angket".



INFOGRAFIK: ISMAWADI